

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA GLAGAHWERO KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi masih ada hambatan karena masih banyaknya keluarga miskin yang perlu bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah dan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya. Sosialisasi mengenai program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Belum semua pihak yang terkait dalam melaksanakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan baik.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni suatu analisa yang menggambarkan keadaan objek penelitian yang berupa kata-kata atau kalimat yang terpisah, gambar dan bukan angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program RTLHU di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat belum berjalan dengan pihak yang terkait melaksanakan program belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan belum sepenuhnya sosialisasi dilakukan dengan baik, sehingga pengurus dan masyarakat pemahamannya terbatas dalam program RTLHU. Peneliti memberikan saran mengenai penelitian ini yaitu Dengan meningkatkan koordinasi antara semua pihak Dinas Sosial dengan pihak – pihak lainnya yang terlibat seperti TKSK, tingkat pemerintah desa, serta masyarakat. dengan cara melakukan pendekatan – pendekatan dan memberikan pengarahan terus – menerus dan yang paling penting adalah menambah SDM terutama TKSK agar program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini berjalan optimal.

Kata kunci : Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT

Name : Wardatul Jannah
Study Program : Governmental Science
Title : The Implementation Home rehabilitation is not feasible.
(study in the Glagahwero Village Kalisat Sub-district
Jember District)

This research background is still there constrained in the implementation of House rehabilitation program not eligible in accordance with technical guidelines implementation. The socialization of the unfit Home Rehabilitation Program in its Implementations has not been optimal yet. Not all parties involved in implementing the House Rehabilitation Program is not eligible properly.

The purpose of this research is to know Implementation of program Rehabilitation House not eligible in Glagahwero Village District Kalisat. The theory used in the research is the Implementation Theory of communication, resource, disposition and bureaucratic structure. The method used is qualitative method with descriptive approach.

The explanation of this research is qualitative analysis that is an analysis that describes the state of the research object in the form of separate words or sentences, drawings and not the number. The results show that RTLHU program Implementation in Glagahwero Village Kalisat, sub district has not been running with the relevant parties to implement the program not yet in accordance with the established procedure. And not yet fully socialized well done, so that the management and community of understanding is limited in RTLHU program. Research provide suggestion on the research by improving coordination between all parties of village government, and community. By way of approach – approach and provide continuous direction and the most important is to add human resource especially TKSK for the program Rehabilitation House Not eligible is running optimally.

Keywords: Social Rehabilitation of Houses Uninhabitable, Policy Implementation.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia , bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia. kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi . hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin karena mereka tidak sadar akan kemiskinannya sendiri. Selain itu kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidemensi Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain. Inilah kondisi yang dirasakan oleh Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya penanganan yang serius. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kehidupan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus di penuhi setiap orang .

Dalam menjalani kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupan sehari-hari. Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia tanpa tempat tinggal yang layak manusia tidak akan hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan tepenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan meskipun kenyataanya terdapat peringkat akan pemenuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang

tidak terbatas. Teori Maslow menyebutkan bahwa sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya yaitu sandang, pangan dan kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi kehidupan manusia atau keluarga dalam melanjutkan kehidupannya.

Perumahan merupakan pencerminan dan penjelasan secara mendetail tentang diri pribadi manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam kebersamaan di dalam masyarakat. Dengan demikian Rumah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi jadi jika ditinjau dari proses bermukim rumah merupakan sarana untuk berlindung dari alam memberi ketentraman hidup dan pusat kegiatan budaya. Di rumah dan lingkunganlah dibentuk kepribadian manusia, maka dari itu dibutuhkan perumahan yang aman, nyaman, dan tentram.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memiliki rasa nyaman dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media sebagai pelaksana bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhi salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan ketahanan keluarga.

Pada hakikatnya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik mental dan sosial ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami permasalahan rumah tidak layak huni yang dimiliki atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh karena itu kepedulian menangani masalah tersebut di

harapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta elemen lainnya. Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 H amandemen ke 4, dijelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warganya berhak bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat” . Bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang di peruntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di daerah, penyalurannya dilakukan oleh direktorat penanggulangan kemiskinan perkotaan. Sedangkan di perdesaan, penyaluran dilakukan oleh Direktorat penanggulangan kemiskinan perdesaan. Dalam pelaksanaannya program rehabilitasi rumah tidak layak huni hanya melakukan pemugaran atau merehab rumah. Karena bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan terbatas, maka hanya cukup untuk memperbaiki, bukan untuk merombak total bangunan rumah. Rumah yang di rehabilitasi tersebut harus sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan. Agar pelaksanaannya sesuai dengan penerima, maka para penerima diharuskan memiliki skala prioritas dalam menentukan apa saja yang harus di rehab. Hal ini perlu di lakukan agar dana yang tersedia mencukupi dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi penerima bantuan.

1.1 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, secara umum yang menjadi permasalahan yaitu:

Bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan judul yang telah tertera di atas yakni “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni”, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap implementasi kebijakan program khususnya di tingkat kecamatan.
- b. Memberikan pemahaman secara teori dalam melihat faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan suatu program kebijakan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi temuan baru dalam melihat implementasi suatu program khususnya dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

2. Manfaat praktis

- a. Hasil implementasi kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang telah dilakukan di Desa Glagahwero
- b. Saran bagi kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Glagahwero

3. Manfaat bagi peneliti

- a. Dapat memperkaya pehaman, kemampuan analisis dan akademik mahasiswa dalam hal pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan kondisi nyata mengenai implementasi kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Mendapat pengalaman dalam pendampingan khusus untuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni .
- c. Mendapatkan data valid sebagai bahan penulisan karya ilmiah (skripsi).

LANDASAN TEORI

Untuk menggambarkan implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, peneliti menggunakan teori dari Edward III. dimana implementasi dapat dimulai dari konduksi abstrak dan sebuah dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, Sumber Daya, Sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown atau diturunkan melalui ekspansi implementasi kedalam komponen prinsip.

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor – faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat di ketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan implementor agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau target group sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya

finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan tidak menjadi efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standart (standart operating procedurs atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

METODE ILOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan peneliti adalah “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni”. Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan fenomena tersebut adalah studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut dan tidak berlaku pada kasus lainnya.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa kalisat dengan pertimbangan bahwa masih ditemukan masalah terkait Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kalisat, Kabupaten Jember.

Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan didasarkan pada pengetahuan tentang data atau informan yang diperlukan informasi yang diperlukan. Untuk menentukan infroman salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melalui keterangan orang yang berwenang dan dipandang paling banyak mengetahui terhadap masalah yang akan dikaji.

Adapun teknik yang akan digunakan peneliti dalam menentukan infroman adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, artinya pengambilan dipilih secara sengaja oleh peneliti yang berpedoman pada kriteria yang sudah dibuat sebelum penelitian dilakukan di lapangan.

Teknik Penentuan Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data atau informasi dilapangan, maka dalam penelitian digunakan teknik antara lain dengan Wawancara, Dokumentasi, Observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini adalah analisi deskriptif kualitatif yakni suatu analisa yang menggambarkan keadaan objek penelitian yang berupa kata-kata atau kalimat yang terpisah, gambar dan bukan angka-angka (Moleong 2000:6). Tahapan dalam analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yakni, koleksi data, reduksi data, display data (penyajian data), dan kesimpulan/verifikasi.

a. Koleksi Data

Pada saat melakukan penelitian seringkali terjadi peneliti menemukan banyak sekali mengoleksi atau mengumpulkan data – data yang terkait dengan penelitiannya. Data – data yang didapat bisa berbentuk macam – macam misalnya : data – data sekunder, data hasil observasi, dan yang paling penting untuk memperkuat bukti penelitian yakni data berupa foto – foto pada saat penelitian. Peneliti sebanyak mungkin mencari atau harus memperbanyak koleksi data supaya memudahkan pada saat melakukan hasil analisis dari sebuah penelitian.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

c. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : “the most frequent form of display data for *qualitative research* data in the past has been narrative text” artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan

mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data – data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola – pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

Keabsahan Data

untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, maka data atau informasi yang telah dikumpulkan dari penelitian kualitatif tersebut perlu diuji keabsahan melalui teknik berikut :

Triangulasi sumber, mengadakan perbandingan antara sumber informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada informan yang berbeda atau informan dan dokumentasi serta wawancara’’ Keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan membandingkan atau pengecekan terhadap data tersebut.

Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yakni :

- a. Triangulasi metode, yakni dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai

perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

- b. Triangulasi sumber data, yakni menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing – masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum dan lokasi penelitian

Keadaan umum wilayah desa Glagahwero berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Glagahwero pada tahun 2014, luas wilayah desa glagahwero yakni 290.262,0000 Ha. Dan jumlah penduduk Desa Glagahwero terdiri dari 2.465 kepala keluarga, dengan jumlah keseluruhan 9.867 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki 3.705 dan 3.675 jiwa perempuan. Jarak tempuh Desa Glagahwero kecamatan Kalisat ke kota kecamatan adalah 0,6 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 2 menit dan jarak tempuh ke kabupaten jember ialah 19 Km yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar 17 menit.

Tingkat Ekonomi yang masih rendah dan tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat. Dilihat dari jumlah 192,96% pengangguran, keluarga prasejahtera struktur mata pencarian penduduk dan jumlah KK atau hampir 37,23%. Dari data yang telah didapatkan, penduduk Desa Glagahwero yang bekerja dalam sektor pertanian sebanyak 4655 orang dan di sektor perternakan 255 orang sedangkan yang bekerja di sektor industri ialah 90 orang. Dan yang bekerja di sektor lain – lain ialah 1290 orang. angka pengangguran di Desa

Glagahwero Kecamatan Kalisat masih sangat rendah. Dan berdasarkan data lain yang menyatakan bahwa masyarakat usia 20 – 50 yang belum bekerja sekitar berjumlah 654 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 6045 orang.

Dalam meningkatkan SDM pendidikan sangatlah penting karna pendidikan salah satu agenda penting dan strategi yang menuntut perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak. Sebab, pendidikan adalah faktor utama atau penentu kemajuan bangsa di masa depan. Jika berhasil membangun dasar-dasar pendidikan nasional dengan baik, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dibidang-bidang lain yang menentukan sumber daya manusia (SDM) yang dalam konteks ilmu-ilmu administrasi dan lain sebagainya agar meningkatnya daya produksi manusia. Sehingga masyarakat bisa membuka usaha sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa Glagahwero. Berikut data tingkat pendidikan di Desa Glagahwero Kecamatan kalisat Jember.

Dalam pelayanan kesehatan semua masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang baik dan pemerintah menjamin hak sehat bagi penduduknya. Pelayanan kesehatan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari sarana prasarana, antrian yang panjang atau kurang kondusif, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi dan lain sebagainya.

Implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Kebijakan program Rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah program Kementrian Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan ini menjadi penting dan strategis atau tepat sasaran. Karena rumah merupakan tempat yang utama guna tepenuhinya bebagai kebutuhan dan pelaksanaan peranan sosial bagi anggota keluarga. Di dalam rumah tercipta interaksi sosial, transfer budaya dan proses sosialisasi secara intens selain itu rumah memiliki fungsi sebagai tempat istirahat dan berlindung dari berbagai situasi bencana. Dalam pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLHU) peran pendamping dibutuhkan dari proses awal hingga pelaporan. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pendamping, maka dilakukan pementapan yang terkait dengan materi tugas - tugas pendampingan yang harus dilaksanakan.

A. Tujuan dari bantuan program Rumah Tidak Layak Huni :

1. Meningkatkan rumah tidak layak agar menjadi layak huni
2. Meningkatkan kenyamanan rumah tempat tinggal penerima manfaat bantuan
3. Menumbuhkan nilai – nilai kegotongroyongan, pasrtisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara penerima manfaat bantuan dan warga masyarakat setempat.

B. Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam menetapkan penerima manfaat bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang menjadi acuan dalam menetapkan penerima manfaat. Adapun kriteria yang dimaksud dapat dilihat dari dua aspek yaitu seperti tabel dibawah ini :

No	Penerima Manfaat	Bangunan Rumah
1	Data berasal dari BDT (basis data terpadu)	Tidak permanen dan atau semi permanen
2	Penerima manfaat bantuan KIS, KIP, PKH, dan RASTRA.	Atap dinding dan lantai (aladin) dalam kondisi rusak
3	Penduduk tetap yang menjadi sasaran RTLHU dibuktikan dengan KTP, KK dan surat keterangan domisili.	Di utamakan rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi cuci
4	Kepala keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang tetap atau mempunyai mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok ysnng layak.	Status tanah dan bangunan milik sendiri dan tidak dalam keadaan sengketa bukan milik saudara atau sewa yang dibuktikan lewat sertifikat, atau surat keterangan kepemilikan dari desa atas status tanah
5	Tidak terpenuhnya kebutuhan dasar secara layak	
6	Bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah yang di rehabilitasi minimal 5 tahun sejak menerima bantuan	

penerima bantuan Rehabiliatsi Rumah Tidak layak Huni di Desa Glagahwero berjumlah 9 orang, semua daftar penerima bantuan adalah masyarakat miskin dimana

rumah mereka tidak layak untuk di huni, semua penerima bantuan tersebut memiliki pekerjaan yang tidak tetap dan yaitu sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka tidak mampu, terlebih untuk merehabilitasi rumah mereka masing – masing mereka juga tidak mampu. Peningkatan kualitas tempat hunian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi melaksanakan berbagai aktivitas sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Glagahwero Kecamatan kalisat kabupaten Jember. Hal yang utama dalam pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bukan terletak pada jumlah bantuan yang diterima, melainkan bagaimana menciptakan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat penerima bantuan tersebut.

Mekanisme Alur Kerja Program RTLHU

Secara standart prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementrian sosial program Rehabilitasi rumah tidak layak huni maka mekanisme dan alur yang dilakukan adalah sebagai berikut :

A. Awal verifikasi

Dinas Sosial Kabupaten Jember melalui pendamping TKSK, melakukan verifikasi calon penerima manfaat bantuan rehabiliasi rumah bantuan RLTHU yang bersumber dari data BDT yang juga menerima bantuan program KIS, PKH, KIP.

\

Pemetaan lokasi



Sesuai dengan formulir verifikasi lampiran yang terlampir sebanyak lima lampiran. Selanjutnya Dinas Sosial dan TKSK sebagai pendamping program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melakukan penjajakan lokasi terhadap hasil verifikasi data yang telah dilakukan. Dan Tksk membentuk kelompok melalui pemerintah desa dalam membentuk kelompok dan nama kelompok calon penerima manfaat bantuan RTLHU yang di dasarkan pada jarak tempat yang terdekat. Dinas Sosial dan TKSK sendiri melakukan sosialisasi dan koordinasi terlebih dahulu tentang program bantuan ini dengan pemerintah Desa terlebih dahulu.

Kelompok yang telah dipilih oleh TKSK dan pemerintah desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota dengan jumlah kelompok 5 – 10 KK. Berdasarkan verifikasi dan pengelompokan calon penerima manfaat bantuan Rumah Tidak Layak Huni barulah Dinas Sosial mengajukan permohonan bantuan RTLHU ke Kementrian Sosial yang dilengkapi dengan data lokasi dan data calon penerima manfaat by name by address dengan surat tembusan Dinas Sosial. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan dokumen administrasi direktorat penanganan fakir miskin mengeluarkan surat keputusan penerima manfaat bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak

Layak Huni, Nama penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan sebagaimana tidak dapat digantu kecuali penerima manfaat bantuan meninggal dunia dan mengundurkan diri, dengan melampirkan surat keterangan dibuat oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten yang menyatakan alasan pergantian ke Direktur penanganan fakir miskin.

B. Penyaluran bantuan program

Setelah penetapan, penerima manfaat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilanjutkan dengan menyalurkan bantuan melalui transfer dana ke rekening kelompok penerima manfaat bantuan. Sebelum menggunakan dana bantuan penerima manfaat akan mendapatkan bimbingan teknis. Bimbingan teknis bertujuan agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dapat menggunakan dana secara optimal sesuai Mengingat pentingnya kebutuhan kebutuhan dasar (Rumah layak huni) bagi masyarakat yang utamanya ekonomi menengah kebawah di Desa Glagahwero sendiri dalam memberikan bimbingan teknis dilakukan selama satu bulan penuh.

Fakir miskin yang masuk dalam data BDT dan memenuhi kriteria penerima manfaat bantuan akan mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi kewajiban secara tertulis berupa pertanggung jawaban pembelian bahan – bahan bangunan perbaikan rumah. Berikut hak dan kewajiban penerima manfaat bantuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Hak dan kewajiban penerima bantuan manfaat :

No	Hak	Kewajiban
1	Memporoleh dana bantuan RTLHU sebesar Rp. 15.000,00 per KK	Melakukan perbaikan rumah
2	Mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang program RTLHU	Melakukan perbaikan rumah
3	Mendapatkan layanan pendampingan	Mengikuti layanan pendampingan secara sungguh – sungguh
		Mengikuti dan mentaati semua ketentuan yang sudah disepakati
		Membuat proposal dana

		pemanfaatan dana bantuan RTLHU.
		Melakukan pencatatan dan pelaporan dan pengelolaan laporan dana bantuan RTLHU sesuai dengan bukti – bukti pembelian bahan bangunan Membangun rumah secara gotong royong bersama masyarakat setempat.

Untuk Besarnya dana bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk 1 (satu) unit rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk perbaikan atau renovasi rumah dengan prioritas kondisi atap, lantai dan dinding (ALADIN), dan sarana mandi cuci kakus (MCK) dalam rumah, dalam keadaan rusak yang telah dituangkan dalam rincian anggaran biaya dengan melampirkan bukti pembelian bahan bangunan. Dana RS-RTLH yang sudah masuk dalam rekening kelompok dapat dicairkan dengan terlebih dahulu kelompok mengajukan usulan pemanfaatan dana yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Bendahara dengan persetujuan pejabat Dinas Sosial Kabupaten. Setelah dana masuk ke rekening kelompok, paling lambat 15 hari kalender dana tersebut harus sudah dimanfaatkan untuk perbaikan rumah. Dana bantuan yang telah dicairkan dibelanjakan sesuai dengan usulan dan peruntukannya dan bukti pembelian atau pembelanjaan menjadi bahan dalam penyusunan laporan kegiatan kelompok.

Dalam pemanfaatan dana diperlukan juga laporan dari pemanfaatan dana tersebut. Pelaporan pemanfaatan dana bantuan RS-RTLH dibuat berdasarkan kuitansi pembelian atas bahan bangunan rumah sesuai dengan proposal yang telah dibuat. Pendamping memfasilitasi anggota kelompok dalam pelaporan bantuan yang diterima. Laporan disusun secara berjenjang oleh pendamping yang disampaikan kepada Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas Sosial Provinsi. Laporan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi, pertanggungjawaban dan sebagai bahan menetapkan langkah-langkah pengambilan keputusan. Format pelaporan berisi minimal aspek-aspek berikut:

- a. Daftar kelompok dan nama penerima manfaat bantuan RS-RTLH.
- b. Rincian bahan bangunan yang dibeli dan harganya.
- c. Kuitansi pembelian bahan bangunan rumah.
- d. Fotocopy transaksi buku rekening.
- e. Kemajuan dan hambatan.
- f. Dokumentasi (foto rumah sebelum, proses dan sesudah rehabilitasi).
- g. Lain-lain yang dianggap perlu.

C. Proses Pembangunan

Dalam proses pembangunan masyarakat yang terlibat dalam rehabilitasi rumah ialah pengurus sekaligus penerima bantuan program Rehabilitasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan ada beberapa masyarakat yang ikut membantu secara sukarela bahkan ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan yang ikut membantu dalam proses pembangunan tersebut. Proses pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak sendiri dilakukan selama kurang lebih 40 hari.

D. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Sosial, pendamping TKSK, dan Pemerintah Desa Kegiatan monitoring ini ditujukan agar proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku monitoring dilakukan secara rutin untuk mengetahui secara dini apabila ada permasalahan. Dinas Sosial Kabupaten, dan pendamping, serta Pemerintah desa mengevaluasi secara bersama-sama, baik melalui APBN maupun APBD.

E. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu instrumen yang sangat penting untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan. Laporan yang disampaikan diharapkan berada pada kisaran waktu yang ditetapkan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan monitoring dan evaluasi dan sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan Yang meliputi poin dibawah ini :

1. Perkembangan pencairan dan pemanfaatan dana bantuan stimulan.
2. Kegiatan pendampingan.

3. Permasalahan atau kendala yang dihadapi
4. Solusi penanganan masalah dan rekomendasi
5. Dokumentasi/lampiran

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka berikut adalah yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi program RTLHU yang terkait dengan teori Edward III sejauh ini Di Desa Glagahwero sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa kendala yang peneliti temukan. Yaitu :

1. **Komunikasi** dimana kurangnya komunikasi antara pihak implementator dan pihak – pihak yang terlibat. Dan masih ada pihak yang belum mengetahui dengan jelas tentang program RTLHU.

Kurangnya koordinasi pihak – pihak terkait. Prosedur pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni salah satu yang harus direhab ialah masyarakat yang rumahnya tidak memiliki fasilitas kamar mandi. Pada kenyataannya semua rumah penerima bantuan yang telah direhab tidak dibangun kamar mandi dan tidak setiap hari dilakukan monitoring dari pihak pendamping program, dan pemerintah Desa yang terkait. Dalam implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni.

2. **Sumber Daya** Manusia termasuk unsur penting dalam berjalannya program dengan baik sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah dibuat tetapi dalam Sosialisasi dan wewenang dari pihak pelaksana kurang maksimal dan efektif. Pengurus pelaksana yang terpilih dalam keterampilan juga masih belum sepenuhnya menguasai pelaksanaan program yaitu dalam pencairan dana mereka tidak bisa melakukan penarikan dana di BANK maka harus dibantu oleh pendamping TKSK dalam melakukan pencairan, kurangnya tenaga pendamping

TKSK, mereka kewalahan dalam melakukan pendataan dan tugas lainnya. Karena setiap kecamatan hanya ada 1 TKSK saja.

3. Dinas sosial adalah **struktur organisasi** bertanggung Jawab dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tetapi kinerja dari semua pihak masih belum optimal terutama Dinas Sosial karena tidak ikut menggerakkan masyarakat miskin dalam program RTLHU. TKSK sebagai kepanjangan tangan Dinas Sosial dalam program ini juga kurang memonitor secara rutin dalam proses pembangunan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, prosedur kerja dalam program RTLHU sangat jelas bahwa program pelaksanaan RTLHU harus secara rutin di monitor agar terlaksana dengan baik.
4. **Disposisi** atau sikap dari Dinas Sosial, TKSK serta pengurus masyarakat pelaksana dalam program RTLHU sudah cukup baik. Tidak ada sikap dari pihak – pihak terkait yang mlenceng dari norma – norma yang berlaku.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka yang menjadi catatan penting peneliti sebagai bahan acuan untuk menyempurnakan kebijakan program RTLHU, yakni sebagai berikut :

1. Dengan meningkatkan koordinasi antara semua pihak Dinas Sosial dengan pihak – pihak lainnya yang terlibat seperti TKSK, tingkat pemerintah desa, serta masyarakat. dengan cara melakukan pendekatan – pendekatan dan memberikan pengarahan terus – menerus dan yang paling penting adalah menambah SDM terutama TKSK agar program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan awal.
2. Meningkatkan pengawasan pelaksana dengan mengadakan pelatihan – pelatihan agar semua pihak yang terkait paham betul tentang program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Dalam pelaksanaan program sudah ada prosedur kerja, seharusnya pendamping, mengikuti prosedur yang telah berlaku dengan memonitor proses pembangunan secara rutin agar implementasi program benar – benar berjaln dengan baik.

3. Dinas Sosial, bertanggung jawab atas program RTLHU maka sebaiknya dalam sosialisasi dilakukan secara optimal. Dan ikut menggerakkan masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah Desa dan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat.

